

IMPLEMENTASI PROGRAM KETAHANAN PANGAN PADA DESA MURUNG BARU DAN PAMARANGAN KANAN KECAMATAN TANTA KABUPATEN TABALONG

Nefa Indah Kumalasari¹, Arif Budiman², Ahmad Baihaqi³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
email: indahnefa@gmail.com

ABSTRAK

Program ketahanan pangan merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan secara berkelanjutan di tingkat masyarakat, khususnya wilayah pedesaan. Namun, pelaksanaannya di tingkat desa masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Ketahanan Pangan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya di Desa Murung Baru dan Desa Pamarangan Kanan, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari aparat pemerintah daerah, aparat desa, penyuluh pertanian, dan petani penerima manfaat. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan mengacu pada model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program telah berjalan, tetapi belum optimal. Hambatan utama meliputi kurang efektifnya komunikasi antarinstansi, keterbatasan pengawasan terhadap kualitas bantuan, serta rendahnya partisipasi sebagian petani. Di sisi lain, dukungan pemerintah desa dan peran aktif penyuluh pertanian menjadi faktor pendukung penting. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan pengawasan mutu bantuan, serta intensifikasi sosialisasi dan pendampingan agar implementasi program ketahanan pangan lebih efektif dan berkelanjutan..

Kata kunci: ketahanan pangan, implementasi kebijakan, pembangunan desa, pertanian, Tabalong

ABSTRACT

The food security program is a strategic government policy aimed at ensuring the availability, accessibility, and sustainable utilization of food at the community level, particularly in rural areas. However, its implementation at the village level still faces various challenges. This study aims to analyze the implementation of the Food Security Program and identify the supporting and inhibiting factors affecting its execution in Murung Baru Village and Pamarangan Kanan Village, Tanta District, Tabalong Regency. The research employed a qualitative approach with a descriptive design. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving local government officials, village authorities, agricultural extension workers, and beneficiary farmers. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing, referring to George C. Edwards III's policy implementation model, which emphasizes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results indicate that the program has been implemented but has not yet reached optimal outcomes. The main obstacles include ineffective inter-agency communication, limited supervision of the quality of assistance, and low participation among some farmers. On the other hand, support from village governments and the active role of agricultural extension workers serve as important facilitating factors. Therefore, strengthening cross-sector coordination, improving quality control of assistance, and intensifying socialization and mentoring are necessary to enhance the effectiveness and sustainability of the food security program.

Keywords: food security, policy implementation, rural development, agriculture, Tabalong.

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan fondasi strategis dalam pembangunan nasional karena berimplikasi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, stabilitas sosial, dan ketahanan ekonomi negara. Konsep ketahanan pangan tidak hanya menekankan pada ketersediaan pangan dalam jumlah memadai, tetapi juga mencakup dimensi akses, pemanfaatan, dan stabilitas secara berkelanjutan. Keempat dimensi tersebut harus terpenuhi secara simultan agar masyarakat dapat menjalani kehidupan yang sehat, aktif, dan produktif. Gangguan pada salah satu dimensi, baik akibat krisis ekonomi, bencana alam, persoalan distribusi, maupun kelemahan tata kelola kebijakan, berpotensi meningkatkan risiko kerawanan pangan, malnutrisi, serta instabilitas sosial (Hayat, 2018).

Dalam konteks kebijakan publik, pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat strategi ketahanan pangan melalui berbagai instrumen, seperti subsidi benih dan pupuk, pengembangan infrastruktur pertanian, serta perluasan lahan produktif melalui program cetak sawah. Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga stabilitas pasokan dan meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya komoditas pangan pokok (Nugroho, 2015). Di Kabupaten Tabalong, implementasi program cetak sawah seluas 534 hektar pada tahun 2025 menjadi bagian dari agenda nasional peningkatan kapasitas produksi pangan berbasis penguatan lahan berkelanjutan.

Secara empiris, sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi program ketahanan pangan di tingkat desa belum sepenuhnya optimal. Studi Ariyanti (2021) mengidentifikasi kendala pada aspek komunikasi, keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta dominannya pendekatan top down dalam perencanaan program (Ariyanti, 2024). Temuan serupa disampaikan oleh Mizwar, Murtasidin, dan Pratama (2020–2023), yang menekankan persoalan koordinasi, keterlambatan distribusi bantuan, serta kapasitas teknis petani yang belum memadai. Meskipun demikian, kedua penelitian tersebut juga mencatat adanya dampak positif terhadap peningkatan produktivitas dan kesadaran masyarakat (Teddy Mizwar, 2025).

Kendati telah banyak kajian membahas implementasi program ketahanan pangan, masih terdapat celah penelitian (*research gap*), khususnya terkait analisis implementasi pada konteks perluasan lahan melalui program cetak sawah di Kabupaten Tabalong yang dikaitkan secara spesifik dengan persoalan ketepatan waktu distribusi bantuan, mutu input pertanian, serta tingkat pemanfaatan bantuan oleh petani. Fenomena di Kecamatan Tanta menunjukkan adanya keterlambatan penyaluran benih, ketidaksesuaian kualitas bantuan, serta rendahnya optimalisasi pemanfaatan bantuan oleh sebagian petani. Kondisi ini mengindikasikan bahwa permasalahan implementasi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan program, tetapi juga efektivitas pelaksanaan di tingkat lokal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program ketahanan pangan di Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, dengan menelaah faktor faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Secara khusus, penelitian ini berupaya mengidentifikasi kendala distribusi, kualitas bantuan, serta tingkat partisipasi petani sebagai determinan utama keberhasilan program. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam kajian implementasi kebijakan publik serta rekomendasi praktis bagi penguatan tata kelola program ketahanan pangan di tingkat daerah.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Murung Baru dan Desa Pamarangan Kanan, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif karena kedua desa tersebut merupakan wilayah pelaksanaan Program Aksi Ketahanan Pangan yang dikoordinasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan

Hortikultura Kabupaten Tabalong, sehingga relevan dengan fokus kajian implementasi kebijakan di tingkat desa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif untuk memahami secara mendalam proses implementasi program, termasuk peran aktor, kendala, serta dinamika pelaksanaannya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggambarkan fenomena secara holistik dan kontekstual sesuai kondisi lapangan (Creswell, 2018).

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 11 informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* (Abdussamad, 2021), meliputi unsur Dinas Ketahanan Pangan, aparat desa, penyuluh pertanian lapangan (PPL), aparat TNI/Polri, serta pengurus dan anggota kelompok tani. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan kegiatan, regulasi, dan literatur ilmiah yang relevan. Kerangka analisis mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menekankan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi dianalisis melalui kejelasan dan konsistensi informasi serta proses sosialisasi program; sumber daya mencakup ketersediaan SDM, anggaran, dan sarana pendukung; disposisi berkaitan dengan komitmen dan tanggung jawab pelaksana; sedangkan struktur birokrasi dilihat dari pembagian tugas, prosedur kerja, dan koordinasi antarunit.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi sebagaimana dikemukakan Miles dan Huberman. Untuk menjamin kredibilitas data, penelitian menerapkan triangulasi sumber dan teknik, perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, serta member check guna memastikan kesesuaian antara data dan informasi dari informan.

PEMBAHASAN

Implementasi Program Ketahanan Pangan Pada Desa Murung Baru dan Pamarangan Kanan, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong

1. Komunikasi

a. Kejelasan informasi kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan informasi kebijakan dalam implementasi program ketahanan pangan di Desa Murung Baru dan Desa Pamarangan Kanan pada dasarnya telah disampaikan secara berjenjang dari pemerintah pusat hingga tingkat desa dan kelompok tani. Namun, kualitas penyampaian informasi di kedua desa menunjukkan perbedaan. Di Desa Murung Baru, informasi kebijakan relatif lebih jelas dan mudah dipahami karena didukung oleh sosialisasi yang aktif, pendampingan penyuluh pertanian, pelatihan, serta keterlibatan pemerintah desa dan aparat pendamping. Sebaliknya, di Desa Pamarangan Kanan, penyampaian informasi kebijakan dinilai cukup baik tetapi belum merata karena keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi masih terbatas. Selain itu, keterlambatan penyaluran bantuan yang dipengaruhi kendala pada tingkat provinsi turut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kejelasan informasi kebijakan. Secara keseluruhan, kejelasan informasi kebijakan dapat dikategorikan cukup baik, namun masih terdapat hambatan pada aspek pemerataan informasi dan ketepatan waktu penyaluran bantuan.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa komunikasi kebijakan merupakan unsur penting dalam menentukan keberhasilan implementasi program. Hal ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang menegaskan bahwa kejelasan, konsistensi, dan penyampaian informasi yang efektif kepada pelaksana maupun

kelompok sasaran menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks penelitian ini, komunikasi kebijakan sebenarnya telah dilakukan secara formal dan berjenjang, yang tercermin dari adanya sosialisasi, pendampingan penyuluh, serta dukungan perangkat desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara struktural sistem komunikasi kebijakan sudah berjalan.

b. Konsistensi komunikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsistensi komunikasi dalam implementasi program ketahanan pangan di Desa Murung Baru dan Desa Pamarangan Kanan pada dasarnya telah berjalan secara berkelanjutan melalui sosialisasi, pendampingan penyuluh pertanian, pertemuan kelompok tani, serta koordinasi antara dinas, pemerintah desa, dan aparat pendamping. Namun, terdapat perbedaan kualitas pelaksanaannya. Di Desa Murung Baru, konsistensi komunikasi dinilai lebih baik karena informasi program disampaikan secara rutin dan relatif seragam kepada kelompok tani. Sementara itu, di Desa Pamarangan Kanan, komunikasi kebijakan memang dilakukan secara berkala, tetapi belum sepenuhnya menjangkau seluruh petani secara merata. Selain itu, keterlambatan informasi dari tingkat provinsi dan ketidaktepatan waktu penyaluran bantuan menyebabkan ketidaksinambungan informasi yang berdampak pada kesiapan petani dalam memanfaatkan bantuan. Secara umum, konsistensi komunikasi kebijakan berada pada kategori cukup baik, meskipun masih menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konsistensi komunikasi menjadi faktor penting dalam memastikan pesan kebijakan diterima secara sama oleh seluruh pelaksana dan kelompok sasaran. Hal ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang menekankan bahwa komunikasi yang konsisten, jelas, dan tidak saling bertentangan merupakan prasyarat utama keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks penelitian ini, mekanisme komunikasi telah dirancang secara sistematis melalui pertemuan kelompok tani, pendampingan penyuluh, serta koordinasi lintas aktor di tingkat desa.

c. Sosialisasi kepada pelaksana dan masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi program ketahanan pangan di Desa Murung Baru dan Desa Pamarangan Kanan secara umum telah dilakukan secara terencana dan melibatkan berbagai pihak, seperti dinas terkait, penyuluh pertanian, pemerintah desa, aparat pendamping, serta kelompok tani. Namun, tingkat efektivitas sosialisasi di kedua desa berbeda. Di Desa Murung Baru, sosialisasi dinilai lebih baik karena dilakukan secara langsung kepada kelompok tani melalui pertemuan rutin, pelatihan, dan pendampingan, sehingga informasi program dapat diterima secara lebih merata oleh petani. Sebaliknya, di Desa Pamarangan Kanan, sosialisasi memang berjalan cukup baik, tetapi masih sering dilakukan melalui sistem perwakilan kelompok tani atau desa, sehingga tidak seluruh petani menerima informasi secara langsung. Kondisi ini berdampak pada masih ditemukannya permasalahan seperti keterlambatan bantuan, ketidaksesuaian kualitas benih, serta pemanfaatan bantuan yang belum optimal. Secara keseluruhan, pelaksanaan sosialisasi program ketahanan pangan berada pada kategori cukup baik, namun efektivitasnya lebih menonjol di Desa Murung Baru dibandingkan Desa Pamarangan Kanan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa isi kebijakan dipahami oleh pelaksana maupun kelompok sasaran. Hal ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan dari

George C. Edward III yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh aspek komunikasi, khususnya kejelasan, konsistensi, dan efektivitas penyampaian informasi kepada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

2. Sumber daya

a. ketersediaan sumber daya manusia (kompetensi, jumlah pegawai)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dalam implementasi program ketahanan pangan di Desa Murung Baru dan Desa Pamarangan Kanan secara umum berada pada kategori cukup baik. Hal ini terlihat dari kompetensi pelaksana kebijakan, khususnya penyuluh pertanian dan perangkat desa, yang telah memiliki kemampuan melalui pendidikan, pelatihan, serta pengalaman lapangan. Di Desa Murung Baru, kualitas SDM dinilai memadai, tetapi jumlah tenaga pendamping belum sebanding dengan jumlah petani dan luas wilayah, sehingga pendampingan belum optimal dan masih ditemukan pemanfaatan bantuan yang kurang maksimal. Sementara itu, di Desa Pamarangan Kanan, kompetensi penyuluh dinilai cukup baik dan pendampingan relatif berjalan, namun keterlibatan unsur pendamping lain masih terbatas. Secara keseluruhan, ketersediaan SDM di kedua desa tergolong cukup baik, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah tenaga pendamping dan dukungan lintas pihak.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas dan kecukupan sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Hal ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh komunikasi, tetapi juga oleh ketersediaan sumber daya, termasuk sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan jumlah yang memadai.

b. Ketersediaan Anggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan anggaran dalam implementasi program ketahanan pangan di Desa Murung Baru dan Desa Pamarangan Kanan secara umum tergolong cukup memadai karena didukung oleh berbagai sumber pendanaan, seperti APBD kabupaten dan provinsi, alokasi dana desa termasuk ketentuan 20% untuk ketahanan pangan, serta dukungan swadaya masyarakat. Namun, efektivitas pemanfaatan anggaran di kedua desa masih menghadapi beberapa kendala. Di Desa Murung Baru, meskipun kegiatan program tetap berjalan, terdapat hambatan berupa keterlambatan pencairan dana, efisiensi anggaran di tingkat provinsi, serta ketidaksesuaian kualitas bantuan seperti benih, yang menyebabkan beberapa kegiatan program terlambat direalisasikan. Sementara itu, di Desa Pamarangan Kanan, kondisi anggaran dinilai relatif lebih bermasalah karena sering terjadi keterlambatan pencairan dana desa, perubahan mekanisme pengelolaan anggaran melalui BUMDes, serta fluktuasi bantuan yang berdampak pada tertundanya pelaksanaan program dan ketidakstabilan distribusi bantuan kepada kelompok tani. Secara keseluruhan, ketersediaan anggaran dinilai cukup, tetapi belum sepenuhnya mendukung kelancaran implementasi program secara optimal.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketersediaan anggaran merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, terutama pada program yang memerlukan dukungan operasional dan distribusi bantuan secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan

pengelolaan sumber daya, termasuk sumber daya finansial. Tanpa dukungan anggaran yang memadai dan dikelola secara efektif, pelaksanaan kebijakan berpotensi mengalami hambatan meskipun kebijakan tersebut telah dirancang dengan baik.

c. Sarana dan Prasarana pendukung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pendukung dalam implementasi program ketahanan pangan di Desa Murung Baru dan Desa Pamarangan Kanan secara umum berada pada kategori cukup baik, karena telah tersedia berbagai fasilitas seperti bantuan benih, pupuk, alat dan mesin pertanian, serta dukungan infrastruktur dari pemerintah daerah. Namun, tingkat ketersediaan dan kualitas fasilitas di kedua desa berbeda. Di Desa Murung Baru, sarana dan prasarana dinilai cukup baik karena sebagian besar fasilitas telah tersedia, meskipun masih terdapat keterbatasan seperti belum adanya gudang penyimpanan khusus, ketergantungan pada sewa alat panen dari luar daerah, serta ketidaksesuaian beberapa alat dengan kondisi lahan. Sementara itu, di Desa Pamarangan Kanan, kondisi sarana dan prasarana relatif lebih terbatas karena jumlah alat pertanian minim, fasilitas penyimpanan belum memadai, serta kondisi akses jalan yang rusak di beberapa titik sehingga menghambat distribusi bantuan dan kegiatan pertanian. Secara keseluruhan, sarana dan prasarana pendukung sudah tersedia dan memungkinkan program berjalan, tetapi efektivitasnya masih belum optimal.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, khususnya pada program yang berkaitan dengan sektor pertanian. Hal ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya yang memadai, termasuk fasilitas fisik, alat, dan infrastruktur pendukung.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

a. Komitmen Pelaksana Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen pelaksana kebijakan dalam implementasi program ketahanan pangan di Desa Murung Baru dan Desa Pamarangan Kanan secara umum berada pada kategori baik. Di Desa Murung Baru, komitmen terlihat kuat melalui konsistensi pemerintah desa, penyuluh pertanian, BUMDes, dan kelompok tani dalam mengalokasikan anggaran, melakukan pendampingan intensif dari tahap penanaman hingga pemasaran, serta mengembangkan inovasi program seperti pelatihan dan produksi tempe berbasis BUMDes. Komitmen ini membantu menjaga keberlanjutan program meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan sarana dan keterlambatan bantuan. Sementara itu, di Desa Pamarangan Kanan, komitmen pelaksana juga dinilai baik melalui pendampingan rutin oleh penyuluh, koordinasi lintas unsur desa, serta monitoring kegiatan pertanian. Namun, pelaksanaan kegiatan masih sering terhambat oleh faktor anggaran dan fasilitas, sehingga beberapa program belum berjalan tepat waktu. Secara keseluruhan, komitmen pelaksana di kedua desa cukup kuat, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya pendukung.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen pelaksana kebijakan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan implementasi program di tingkat lokal. Hal ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III, khususnya pada variabel disposisi atau sikap pelaksana, yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kesediaan, dedikasi, dan kemauan para pelaksana untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

b. Tanggung jawab pelaksana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaksana kebijakan dalam implementasi program ketahanan pangan di Desa Murung Baru dan Desa Pamarangan Kanan secara umum berada pada kategori baik. Di Desa Murung Baru, tanggung jawab pelaksana terlihat dari keterlibatan aktif berbagai pihak dinas terkait, penyuluh pertanian, pemerintah desa, aparat pendamping, hingga kelompok tani dalam seluruh tahapan program, mulai dari penyaluran bantuan, pendampingan teknis, pemantauan tanaman, penanganan hama, hingga pelaporan kegiatan. Sementara itu, di Desa Pamarangan Kanan, tanggung jawab pelaksana juga terlihat melalui pendampingan rutin, penyampaian informasi teknis, serta monitoring lapangan dan koordinasi dengan dinas. Namun, efektivitas pelaksanaan tanggung jawab tersebut masih dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, sarana prasarana, serta intensitas pendampingan yang belum sepenuhnya merata. Secara keseluruhan, tanggung jawab pelaksana kebijakan sudah berjalan baik, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam mendukung kelancaran program.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaksana kebijakan merupakan faktor penting dalam menjaga keberlangsungan implementasi program di tingkat lokal. Hal ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III, khususnya pada variabel disposisi, yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sikap, komitmen, dan tanggung jawab pelaksana dalam menjalankan tugas sesuai aturan dan tujuan kebijakan.

c. Ketersediaan pelaksana menerima perubahan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan pelaksana menerima perubahan dalam implementasi program ketahanan pangan di Desa Murung Baru dan Desa Pamarangan Kanan secara umum tergolong baik. Para pelaksana kebijakan mulai dari dinas terkait, penyuluh pertanian, pemerintah desa, hingga kelompok tani menunjukkan sikap terbuka terhadap penyesuaian kebijakan, seperti perubahan jenis bibit, pola tanam, penggunaan sistem pendataan baru (Simluhtan), serta mekanisme pelaksanaan program di lapangan. Sikap adaptif ini membantu menjaga keberlanjutan program dan meminimalkan risiko kegagalan kegiatan. Namun, efektivitas adaptasi tersebut masih dipengaruhi oleh beberapa kendala, terutama keterlambatan anggaran, keterbatasan sarana prasarana, serta kualitas bantuan yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan lapangan. Akibatnya, sebagian penyesuaian program berjalan secara bertahap dan belum selalu tepat waktu.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa faktor sikap dan kesiapan pelaksana menjadi elemen penting dalam menjaga keberlangsungan implementasi kebijakan di tingkat lokal. Dalam konteks implementasi program ketahanan pangan, ketersediaan pelaksana untuk menerima perubahan menunjukkan adanya kapasitas adaptif birokrasi lapangan dan aktor pelaksana. Sikap terbuka terhadap evaluasi, penyesuaian teknis, serta penerimaan masukan dari petani menandakan bahwa implementasi kebijakan tidak bersifat kaku, melainkan berkembang sesuai dinamika kondisi lapangan.

4. Struktur Birokrasi**a. Pembagian tugas dan fungsi yang jelas**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian tugas dan fungsi dalam pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa Murung Baru dan Desa Pamarangan Kanan pada dasarnya telah diatur secara jelas dan terstruktur dari tingkat dinas hingga pelaksana lapangan. Pengaturan ini membantu meminimalkan tumpang tindih kewenangan antar pelaksana. Namun, terdapat perbedaan pada tingkat efektivitas implementasinya. Di Desa

Murung Baru, pembagian tugas dan fungsi berjalan relatif lebih optimal karena didukung koordinasi yang cukup baik antar pelaksana, seperti dinas, pemerintah desa, penyuluh pertanian, aparat keamanan, BUMDes/KOPDes, dan kelompok tani. Sementara itu, di Desa Pamarangan Kanan, meskipun pembagian tugas secara struktural telah jelas, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa koordinasi yang belum konsisten sehingga beberapa kegiatan berjalan secara terpisah dan berpotensi mengurangi efektivitas program.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan pembagian tugas dan fungsi merupakan prasyarat penting dalam implementasi kebijakan, tetapi belum cukup untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program di lapangan. Secara formal, kedua desa telah memiliki struktur peran yang jelas, namun kualitas koordinasi dan sinergi antar pelaksana menjadi faktor pembeda utama dalam keberhasilan implementasi program ketahanan pangan.

b. Prosedur kerja yang sederhana dan jelas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur kerja dalam pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa Murung Baru dan Desa Pamarangan Kanan pada dasarnya telah dirancang secara sederhana dan jelas. Hal ini terlihat dari adanya pedoman perencanaan yang terstruktur, persyaratan administrasi yang tidak berbelit belit, serta mekanisme penyaluran bantuan yang mudah dipahami oleh pelaksana dan petani. Namun, tingkat efektivitas implementasinya berbeda. Di Desa Murung Baru, prosedur kerja berjalan relatif lebih efektif karena koordinasi antar pelaksana cukup baik dan proses distribusi bantuan cenderung tertib serta lancar. Sebaliknya, di Desa Pamarangan Kanan, meskipun prosedur kerja secara administratif sederhana, pelaksanaannya masih kurang optimal akibat koordinasi yang belum konsisten dan adanya perbedaan pola pelaksanaan di lapangan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kesederhanaan dan kejelasan prosedur kerja merupakan faktor penting dalam mendukung implementasi kebijakan, namun bukan satu satunya penentu keberhasilan program. Secara normatif, kedua desa telah memiliki prosedur kerja yang relatif sederhana dan mudah dipahami, sehingga secara teoritis seharusnya dapat mempermudah pelaksana dalam menjalankan program ketahanan pangan. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas implementasi tetap sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi dan komunikasi antar pelaksana di tingkat lapangan.

c. Koordinasi antar unit organisasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar unit organisasi dalam pelaksanaan program ketahanan pangan di kedua desa secara umum berada pada kategori cukup baik. Mekanisme koordinasi telah tersedia melalui rapat evaluasi rutin, alur komunikasi yang berjenjang, serta keterlibatan berbagai pihak seperti dinas, pemerintah desa, penyuluh pertanian, kelompok tani, dan aparat pendamping. Namun, efektivitas koordinasi menunjukkan perbedaan. Di Desa Murung Baru, koordinasi berjalan relatif lebih lancar dan sinkron, sehingga kegiatan lapangan lebih terintegrasi. Sebaliknya, di Desa Pamarangan Kanan, meskipun mekanisme koordinasi telah ada, pelaksanaannya masih kurang konsisten karena keterlibatan beberapa unit belum merata dan terdapat kecenderungan pelaksanaan kegiatan yang berjalan sendiri sendiri.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme koordinasi secara formal belum sepenuhnya menjamin efektivitas implementasi kebijakan. Secara administratif, kedua desa telah memiliki forum koordinasi dan jalur komunikasi yang jelas, namun dalam

praktiknya kualitas koordinasi sangat dipengaruhi oleh intensitas komunikasi, komitmen pelaksana, serta keterlibatan aktif seluruh unit organisasi. Dengan kata lain, koordinasi tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga bersifat operasional dan relasional di tingkat lapangan.

Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program ketahanan Pangan Pada Desa Murung Baru dan Pamarangan Kanan, Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong

Faktor yang mempengaruhi implementasi Program Ketahanan Pangan di Desa Murung Baru dan Desa Pamarangan Kanan, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, terdiri atas faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung utama meliputi dukungan dan komitmen pemerintah daerah melalui penyediaan bantuan, pendampingan penyuluh, serta monitoring program yang berjalan secara berkala. Selain itu, ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia, khususnya penyuluh pertanian dan kelompok tani, turut memperlancar pelaksanaan kegiatan di lapangan. Program ini juga didukung oleh sarana dan prasarana pertanian seperti benih, pupuk, dan alat pertanian yang membantu meningkatkan efektivitas usaha tani. Komunikasi dan koordinasi antar pelaksana program yang dilakukan melalui pertemuan rutin maupun media komunikasi juga berkontribusi dalam menjaga kelancaran implementasi. Di samping itu, partisipasi masyarakat dan kondisi lingkungan pertanian yang relatif mendukung turut memperkuat pelaksanaan program. Namun demikian, implementasi program masih menghadapi beberapa hambatan. Faktor cuaca dan kondisi alam yang tidak menentu sering mempengaruhi proses tanam dan hasil produksi pertanian. Selain itu, keterlambatan distribusi bantuan serta kualitas sebagian bantuan pertanian yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan petani menjadi kendala dalam pelaksanaan program. Keterbatasan jumlah aparatur dan beban kerja pelaksana juga berdampak pada proses administrasi dan pengelolaan kegiatan program. Kendala lain yang ditemukan adalah kondisi infrastruktur dan akses menuju lahan pertanian yang belum memadai serta koordinasi teknis yang masih perlu ditingkatkan. Selain itu, proses administrasi dan mekanisme pengusulan bantuan yang cukup panjang menyebabkan distribusi bantuan terkadang tidak tepat waktu. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya, dukungan pemerintah, serta efektivitas koordinasi, sebagaimana dijelaskan dalam teori implementasi kebijakan publik.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi program ketahanan pangan di Desa Murung Baru dan Desa Pamarangan Kanan dengan meninjau aspek sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi. Secara umum, implementasi program di kedua desa telah berjalan dan berada pada kategori cukup baik, karena didukung oleh ketersediaan anggaran, adanya sarana prasarana, komitmen serta tanggung jawab pelaksana, pembagian tugas yang jelas, prosedur kerja yang relatif sederhana, dan mekanisme koordinasi antar unit organisasi.

Namun demikian, efektivitas implementasi menunjukkan perbedaan tingkat optimalisasi. Desa Murung Baru cenderung menunjukkan pelaksanaan yang lebih stabil karena koordinasi, komunikasi, dan sinergi antar pelaksana berjalan relatif lebih baik. Sementara itu, Desa Pamarangan Kanan meskipun memiliki struktur dan mekanisme yang serupa, masih menghadapi kendala dalam konsistensi koordinasi, keterlambatan anggaran, keterbatasan sarana prasarana, serta pelaksanaan kegiatan yang belum sepenuhnya terintegrasi. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan unsur pendukung secara formal, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan, komunikasi, dan konsistensi pelaksanaan di tingkat lapangan,

sebagaimana dijelaskan dalam teori implementasi kebijakan oleh George C. Edward III.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad (2021) *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Ariyanti, D. (2024) 'IMPLEMENTASI KETAHANAN PANGAN (STUDI KASUS DESA TROPODO KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO)', *Jurnal Kelitbangan*, 12 No. 1. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.35450/jip.v12i01.502>.

Creswell, J.W. (2018) *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Los Angeles: SAGE Publications.

Hayat (2018) *Pengantar kebijakan publik: Teori, proses, dan implementasi*. CV. Pustaka Setia.

Nugroho, R. (2015) *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Teddy Mizwar (2025) 'Analisis Implementasi Program Ketahanan Pangan Desa Gadung Bangka Selatan Tahun 2020-2023', *Jurnal Ilmu Sosial*, 10 No. 10. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.9963/7rn27b07>.